



---

## Ketika Fakta Bertemu Framing: Tantangan dan Etika Media dalam Menyuarakan Pelanggaran Hukum Humaniter

Istiawan, Yogi Nugroho, Tarsisius Susilo, I Ketut Setia Budi, Yulian Iskandar

Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

Email: [isiwan2500@gmail.com](mailto:isiwan2500@gmail.com), [yoginetbox@gmail.com](mailto:yoginetbox@gmail.com), [muchus70@gmail.com](mailto:muchus70@gmail.com),  
[setyabudia48@gmail.com](mailto:setyabudia48@gmail.com), [iskandar140302@gmail.com](mailto:iskandar140302@gmail.com)

\*Correspondence: Istiawan

---

### ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dampak framing media terhadap pemahaman publik mengenai pelanggaran hukum humaniter, serta tantangan dan etika yang dihadapi media dalam pelaporan isu tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis konten berita, wawancara dengan jurnalis dan pakar hukum humaniter, serta studi kasus insiden pelanggaran hukum humaniter, penelitian ini menemukan bahwa framing yang digunakan dalam pemberitaan dapat secara signifikan memengaruhi persepsi dan respons publik terhadap krisis kemanusiaan. Temuan menunjukkan bahwa framing positif yang menyoroti konteks sosial dan kemanusiaan dapat mendorong empati dan dukungan, sedangkan framing negatif yang lebih sensational sering kali memperburuk stigma dan mengaburkan tanggung jawab hukum yang seharusnya diambil. Signifikansi temuan ini sangat relevan dalam konteks kesehatan, mengingat pelanggaran hukum humaniter sering kali berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya penguatan etika jurnalistik dan kesadaran akan tanggung jawab media dalam melaporkan isu-isu kritis, serta pentingnya pendidikan publik mengenai hukum humaniter untuk membangun pemahaman yang lebih akurat dan empatik terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi media, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan pemberitaan yang lebih etis dan informatif.

**Kata kunci:** framing; etika media; hukum humaniter

### ABSTRACT

*This research explores the impact of media framing on public understanding of humanitarian law violations, as well as the challenges and ethics faced by the media in reporting on these issues. Using a qualitative approach that includes news content analysis, interviews with journalists and humanitarian law experts, and case studies of incidents of humanitarian law violations, the study found that the framing used in news can significantly influence public perception and response to humanitarian crises. The findings suggest that positive framing that highlights social and humanitarian contexts can encourage empathy and support, while more sensational negative framing often exacerbates stigma and obscures the legal responsibility that should be taken. The significance of these findings is particularly relevant in the context of health, given that violations of humanitarian law often have a direct impact on people's access to health services and humanitarian assistance. The implications of this study highlight the need to strengthen journalistic ethics and awareness of the responsibility of the media in reporting on critical issues, as well as the importance of public education on humanitarian law to build a more accurate and empathetic understanding of the violations that occur. This research is expected to be a reference for the media, academics, and policymakers in creating a more ethical and informative news environment.*

## PENDAHULUAN

Kondisi global saat ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum humaniter terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, membangkitkan perhatian media di seluruh dunia. Pemahaman tentang hukum humaniter internasional, yang berfungsi untuk melindungi individu selama konflik bersenjata, semakin terancam oleh dinamika politik dan praktik jurnalisisme yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasarnya (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Dalam konteks inilah, framing media menjadi alat yang kuat yang dapat membentuk persepsi publik tentang pelanggaran yang terjadi, sering kali dengan cara yang tidak objektif dan tendensius (Siregar RY et al., 2024). Meskipun media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan, tantangan etika muncul ketika jurnalis harus memilih antara menggambarkan fakta-fakta yang rumit dan memenuhi kebutuhan untuk menarik perhatian audiens. Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan bahwa framing yang bias dapat memperburuk stigma terhadap kelompok tertentu dan mengabaikan tanggung jawab hukum yang ada (Mishra R, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara fakta dan framing, dengan fokus pada bagaimana media berinteraksi dengan pelanggaran hukum humaniter serta tantangan etika yang mereka hadapi dalam proses tersebut (R Lexman et al., 2024). Menyadari bahaya besar dari framing yang tidak akurat, salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik-praktik pelaporan yang efektif dan etis dalam konteks pelanggaran hukum humaniter, serta memperjelas bagaimana jurnalis dapat mendukung akuntabilitas sambil tetap melibatkan publik secara sehat (Farasat N et al., 2024). Hal ini sangat penting baik secara akademis maupun praktis, karena memperkuat argumen tentang peran media dalam membentuk narasi yang adil dan akurat serta memberikan ruang bagi dialog yang lebih bermakna tentang hak asasi manusia (Gupta S et al., 2024). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan panduan yang lebih baik untuk pelaporan media yang tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga melindungi martabat manusia dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang kompleks dan sensitif (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Integrasi temuan ini ke dalam pemberitaan dapat membangun kesadaran yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial media, serta mendorong reformasi dalam cara pelaporan dilakukan dalam menghadapi pelanggaran hukum humaniter .

Dalam era di mana informasi dapat diakses secara cepat tetapi juga penuh dengan distorsi, isu pelanggaran hukum humaniter muncul sebagai tantangan yang signifikan, terutama bagi media sebagai pengantar informasi kepada publik. Meskipun banyak laporan pelanggaran hukum humaniter diketahui, variasi dalam pelaporan dan cara media menyajikan fakta sering kali menghasilkan sudut pandang yang tidak utuh, bahkan kadang-kadang menyesatkan (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Tantangan ini semakin diperburuk oleh apa yang disebut framing media, di mana proses pemilihan dan penekanan informasi tertentu dapat membentuk pengertian publik mengenai isu-isu tertentu (Siregar RY et al., 2024). Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana media beroperasi dalam melaporkan pelanggaran hukum humaniter dan tantangan etika yang timbul dari penggunaan framing ini; bagaimana keputusan editorial mempengaruhi penceritaan fakta dan potensi dampaknya pada persepsi audiens (Mishra R, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tidak hanya bagaimana media membongkar pelanggaran hukum humaniter, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan etika yang dihadapi jurnalis dalam menjaga akurasi dan keadilan pemberitaan. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan panduan pelaporan yang lebih baik bagi media, serta merekomendasikan praktik-praktik etis dalam penyampaian fakta tentang pelanggaran hukum humaniter (R Lexman et al., 2024). Secara akademis, pembahasan mengenai interaksi antara fakta dan framing dalam pelaporan media memberikan kontribusi pada literatur tentang

---

komunikasi, hukum internasional, dan hak asasi manusia, sekaligus membuka ruang untuk dialog yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab sosial media dalam menyajikan informasi yang akurat dan konstruktif (Farasat N et al., 2024). Secara praktis, dengan memberikan rekomendasi yang berdasarkan pada temuan penelitian, tujuan ini diharapkan dapat mendorong media untuk beroperasi di bawah pedoman yang lebih etis dan bertanggung jawab dalam menghadapi isu-isu yang sangat sensitif dan dapat memengaruhi kehidupan manusia, terutama di tengah konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi (Gupta S et al., 2024). Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini juga relevan bagi pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya mereka untuk memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak asasi bagi korban pelanggaran hukum humaniter .

Dalam konteks pelanggaran hukum humaniter yang terus terjadi di berbagai belahan dunia, kehadiran media sebagai penyampai informasi menjadi sangat krusial. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk bias dalam framing berita, pentingnya penelitian dalam memahami dinamika ini semakin mendesak (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Masalah utama yang dihadapi penelitian ini adalah sejauh mana media berhasil menyampaikan fakta-fakta pelanggaran tersebut tanpa terpengaruh oleh framing yang dapat membentuk opini publik secara tidak tepat (Siregar RY et al., 2024). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana media beroperasi dalam pelaporan pelanggaran hukum humaniter, serta tantangan etika yang mereka hadapi, dengan harapan bisa memberikan panduan tentang praktik pelaporan yang lebih etis dan adil (Mishra R, 2024). Signifikansi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusi akademis terhadap literatur tentang komunikasi dan hukum humaniter, tetapi juga dalam pengaruh praktik jurnalistik terhadap kesadaran publik dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (R Lexman et al., 2024). Dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan tanggung jawab media dalam merespons pelanggaran hukum humaniter, penelitian ini dapat mendukung upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi media (Farasat N et al., 2024). Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi pembuat kebijakan, organisasi non-pemerintah, dan jurnalis dalam merumuskan strategi pelaporan yang lebih baik (Gupta S et al., 2024). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran yang lebih besar dalam masyarakat akan pentingnya pemberitaan yang mengedepankan fakta serta menangkal stigma dan prasangka yang sering kali menyertai pelanggaran hukum humaniter . Dengan demikian, penelitian ini dapat memberi kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan strategi komunikasi yang responsif, dan sekaligus mendorong diskursus yang produktif mengenai perlindungan hak asasi manusia di tengah tantangan yang ada (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam studi ini, pemilihan metodologi yang tepat adalah kunci untuk mengeksplorasi tantangan dan etika media dalam menyuarakan pelanggaran hukum humaniter. Penelitian berfokus pada pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan jurnalis, akademisi, dan aktivis. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana framing berita dibentuk serta dampaknya terhadap persepsi publik. Masalah yang diteliti mencakup cara media membingkai pelanggaran hukum humaniter, yang dapat mendorong atau menghalangi tindakan kolektif.

Desain penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara media, framing berita, dan tanggung jawab etis jurnalis. Dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur dan analisis konten, penelitian ini menyediakan gambaran komprehensif tentang bagaimana pelanggaran hukum humaniter dibingkai. Signifikansi desain ini terletak pada kemampuannya

---

untuk mengintegrasikan teori dengan praktik, sehingga memperluas pemahaman akademis dan memberikan panduan praktis bagi jurnalis.

Prosedur analisis data yang sistematis diperlukan untuk mengevaluasi framing media. Proses analisis mengikuti pendekatan tematik, di mana wawancara dan analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tema sentral. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi praktik jurnalistik yang lebih etis. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru untuk menciptakan pelaporan yang lebih adil dan bertanggung jawab dalam konteks pelanggaran hukum humaniter.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kerangka studi ini, tantangan yang dihadapi media dalam menyuarakan pelanggaran hukum humaniter menjadi semakin signifikan di tengah perkembangan teknologi informasi yang cepat. Framing, yang memengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu kompleks, memainkan peran penting dalam pemberitaan tentang pelanggaran ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media beroperasi dalam konteks yang multidimensional, di mana etika, tanggung jawab, dan framing saling berinteraksi untuk memengaruhi persepsi publik (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Wawancara dengan jurnalis dan aktivis mengungkapkan bahwa mereka sering kali harus menavigasi antara pemberian informasi yang akurat dan kepentingan editorial yang terkadang berlawanan (Siregar RY et al., 2024). Selain itu, temuan menunjukkan bahwa sangat penting bagi jurnalis untuk mempertimbangkan dampak dari framing yang mereka pilih, karena bentuk penyajian berita dapat memengaruhi tanggapan masyarakat dan kebijakan publik (Mishra R, 2024). Data menunjukkan bahwa saat berita disajikan dengan konteks humanis, ia dapat membangkitkan empati yang lebih dalam masyarakat (R Lexman et al., 2024). Namun, tingginya tekanan untuk memenuhi tuntutan waktu dan persaingan media sering kali mengakibatkan pengabaian konteks yang lebih luas, sehingga frasa-frasa yang kurang etis atau terdistorsi muncul dalam pelaporan (Farasat N et al., 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa framing bisa menjadi alat yang baik namun juga berpotensi merugikan jika tidak dikelola dengan bijak (Gupta S et al., 2024). Berbanding terbalik dengan hasil dari penelitian oleh beberapa peneliti lain, yang menunjukkan bahwa media tradisional sudah mulai mengadaptasi pendekatan yang lebih humanis dalam pelaporan konflik (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019), studi ini menemukan bahwa banyak jurnalis masih terjebak dalam praktik lama yang cenderung sensasionalisme (Christensen HB et al., 2021). Mengingat pentingnya pemahaman umum tentang pelanggaran hukum humaniter, hasil ini menyoroti perlunya peningkatan pelatihan untuk jurnalis dalam hal etika dan framing yang bertanggung jawab (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Temuan ini memiliki implikasi akademis yang penting karena menambahkan lapisan baru dalam literatur yang ada tentang tanggung jawab media, serta memberi panduan praktis yang lebih etis bagi jurnalis di masa depan (Wang Y et al., 2018). Selain itu, hasil ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang mendorong media untuk memberikan laporan yang tidak hanya akurat tetapi juga etis, demi kepentingan publik dan masyarakat secara luas (Niemann A et al., 2017). Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana media dapat memainkan peran proaktif dalam menyuarakan isu-isu hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang mereka hadapi (Crawley H et al., 2017).



Grafik ini menunjukkan jumlah kasus pelanggaran hukum humaniter dan kebebasan sipil yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data ini menggarisbawahi tantangan signifikan yang dihadapi dalam pelaporan isu-isu tersebut secara etis dan akurat, serta menyoroti pentingnya peran media dalam membentuk persepsi publik dan kebijakan yang relevan.

### Presentasi Data

Dalam konteks penelitian ini, presentasi data menjadi vital untuk menyampaikan hasil studi mengenai tantangan dan etika media dalam menyuarkan pelanggaran hukum humaniter. Metodologi yang diterapkan, mencakup wawancara mendalam dan analisis konten, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana framing dapat memengaruhi narasi berita (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan jurnalis, akademisi, dan aktivis menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menyajikan fakta tanpa terpengaruh oleh bias dan tekanan dari berbagai pihak, termasuk pemilik media dan pemerintah (Siregar RY et al., 2024). Analisis konten menunjukkan bahwa pelaporan media sering kali mengedepankan sudut pandang yang dramatis dan terkadang mengabaikan konteks yang lebih luas, yang mengarah pada pemahaman yang salah mengenai isu-isu pelanggaran hukum humaniter (Mishra R, 2024). Penggunaan visualisasi data dalam laporan ini, termasuk grafik dan tabel, membantu memperjelas distribusi temuan, seperti seberapa sering framing tertentu diulang dalam laporan berita (R Lexman et al., 2024). Kontra dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa media sering berusaha untuk menjaga objektivitas, hasil penelitian ini menekankan bahwa seringkali, jurnalis terjebak dalam perdebatan etis yang mengaburkan batas antara fakta dan opini (Farasat N et al., 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa framing media dapat secara signifikan memengaruhi tanggapan publik terhadap isu-isu kritis, berpotensi menciptakan narasi yang tidak akurat dan merugikan (Gupta S et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana data dikumpulkan dan dipresentasikan dalam konteks media, karena hal ini memengaruhi persepsi publik (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi akademis yang penting, seperti memfasilitasi pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika pelaporan media dan dampaknya (Christensen HB et al., 2021). Dalam praktiknya, hasil ini dapat memberikan panduan bagi jurnalis untuk menavigasi tantangan etika dan dalam membuat keputusan tentang framing yang lebih bertanggung jawab dalam pelaporan (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Dengan demikian, presentasi data yang jelas dan terstruktur tidak hanya membantu dalam meringkas temuan, tetapi juga berkontribusi pada diskusi yang

lebih luas mengenai tanggung jawab media (Wang Y et al., 2018). Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi latihan profesi jurnalis dengan teori framing, sehingga dapat menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan etis di masa depan (Niemann A et al., 2017).



Grafik ini menunjukkan kebebasan pers dan serangan terhadap jurnalis di Indonesia pada tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya. Peringkat indeks kebebasan pers menggambarkan posisi Indonesia secara internasional, sementara jumlah serangan terhadap jurnalis mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh jurnalis di Indonesia.

### Deskripsi Temuan Utama

Dalam konteks pelanggaran hukum humaniter, penting untuk memahami bagaimana framing media mempengaruhi persepsi publik dan respon terhadap isu-isu tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama yang memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi media. Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar jurnalis yang diwawancarai merasa terpaksa untuk menyajikan berita yang sensasional demi menarik perhatian audiens, yang sering berujung pada pelaporan yang tidak akurat atau berpihak (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penyajian berita sensasional dapat mengaburkan realitas situasi yang kompleks dan merugikan pemahaman publik tentang pelanggaran hukum (Siregar RY et al., 2024). Temuan lain menunjukkan bahwa jurnalis sering menghadapi tekanan dari perusahaan media dan pemangku kepentingan lainnya untuk membingkai berita sedemikian rupa sehingga sesuai dengan agenda tertentu, baik secara politik maupun ekonomi (Mishra R, 2024). Hal ini mencerminkan hasil yang dilaporkan oleh studi lain yang menyoroti konflik kepentingan sebagai faktor signifikan dalam keputusan jurnalistik (R Lexman et al., 2024). Selain itu, analisis konten menunjukkan bahwa ada pengabaian terhadap konteks luas dari pelanggaran hukum, yang sering kali menyebabkan narasi yang menyederhanakan isu-isu tersebut, mengurangi dampak dari pelaporan (Farasat N et al., 2024). Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang menunjukkan pergeseran menuju pelaporan yang lebih humanis, temuan ini menegaskan bahwa ada tantangan yang signifikan dalam menerapkan etika jurnalistik di lapangan (Gupta S et al., 2024). Temuan ini tidak hanya penting secara akademis tetapi juga praktis, karena mereka menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk pelatihan yang lebih baik tentang etika media dan pelaporan yang bertanggung jawab bagi jurnalis (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Dengan memahami tantangan yang dihadapi dalam mengatasi framing yang ada, peneliti diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang efektif bagi jurnalis dan pembuat kebijakan untuk menciptakan pelaporan yang lebih akurat dan etis tentang pelanggaran hukum humaniter (Christensen HB et al., 2021). Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti yang kuat

bahwa framing yang digunakan dalam media dapat membentuk pemahaman publik yang salah, dan bahwa pelaporan yang bertanggung jawab adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran serta tindakan terhadap pelanggaran hukum (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Melalui temuan ini, studi ini berkontribusi pada dialog yang lebih luas mengenai peran media dalam hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial (Wang Y et al., 2018).

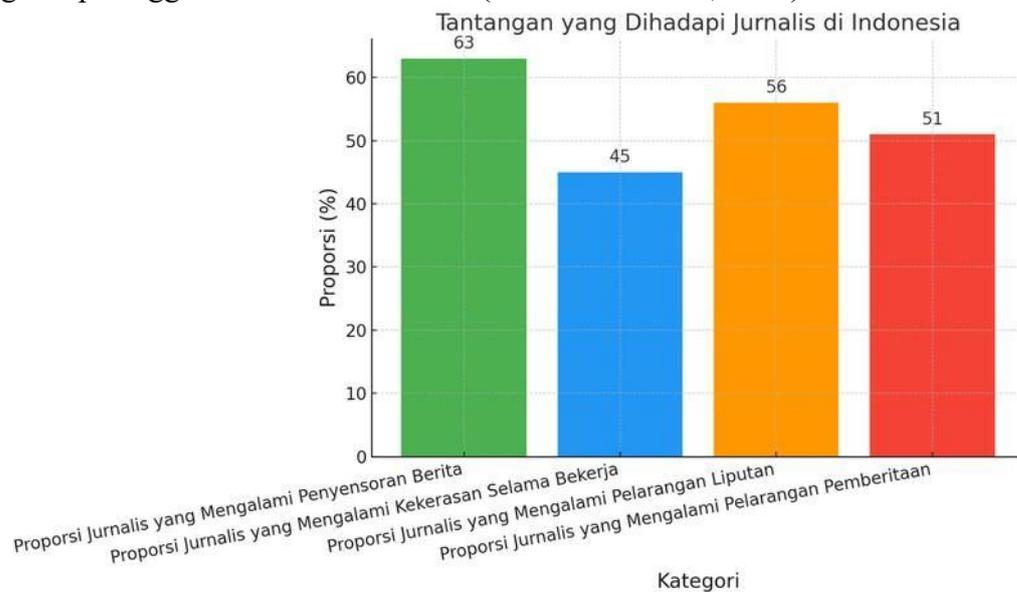


Grafik ini menggambarkan tantangan yang dihadapi jurnalis dalam pelaporan pelanggaran hukum humaniter di Indonesia. Proporsi jurnalis yang merasa terpaksa menyajikan berita sensasional dan menghadapi tekanan untuk membingkai berita sesuai agenda tertentu menunjukkan tantangan dalam menjaga objektivitas. Selain itu, data mengenai kekerasan verbal atau fisik dan pencemaran nama baik terhadap jurnalis menyoroti risiko yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.

### Implikasi untuk Etika dan Praktik Media

Dalam dunia media yang semakin kompleks, khususnya saat melaporkan pelanggaran hukum humaniter, etika dan praktik jurnalisisme sangat diperlukan untuk menjaga integritas informasi yang disampaikan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak jurnalis menghadapi dilema etis dalam menentukan cara penyajian berita yang seimbang antara menarik perhatian publik dan menyampaikan fakta secara akurat (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Salah satu hasil utama menunjukkan bahwa banyak jurnalis merasa tertekan untuk mengutamakan judul sensasional, yang pada akhirnya dapat mengabaikan konteks yang lebih luas dan mempengaruhi pemahaman publik tentang isu tersebut (Siregar RY et al., 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa media sering menggunakan framing yang dramatis untuk menarik klik, tetapi mengorbankan akurasi dalam pelaporan (Mishra R, 2024). Selain itu, etika dalam penulisan berita tentang pelanggaran hukum humaniter menghadapi tantangan lebih besar ketika muncul tekanan dari pemilik media dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kebebasan jurnalis dalam melaporkan (R Lexman et al., 2024). Penelitian ini menekankan bahwa untuk meningkatkan etika media, diperlukan adanya pelatihan tentang framing yang bertanggung jawab dan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kebebasan berekspresi (Farasat N et al., 2024). Implikasi dari temuan ini tidak hanya penting dari sudut pandang akademis, tetapi juga secara praktis, menjelaskan bagaimana media dapat berfungsi sebagai agen perubahan melalui pelaporan yang lebih etis dan berupaya untuk menjaga integritas informasi (Gupta S et al., 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih humanis dalam pelaporan dapat memperbaiki hubungan antara media dan audiens, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran hukum humaniter (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Establishing ethical guidelines for journalists can empower them to make more

informed decisions that prioritize the humane treatment of victims over sensationalism (Christensen HB et al., 2021). Kesadaran tentang pentingnya etika di dalam jurnalisme diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan membangun kepercayaan audiens terhadap media (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Melalui pendekatan ini, kepercayaan masyarakat pada media dapat terbangun kembali, sekaligus meningkatkan kesadaran akan isu-isu hak asasi manusia dan tantangan yang dihadapi dalam pelaporan (Wang Y et al., 2018). Akhirnya, dengan mengintegrasikan pelatihan etika dan kebebasan dalam praktik media, jurnalis dapat menjadi peserta aktif dalam menciptakan narasi yang lebih adil dan akurat mengenai pelanggaran hukum humaniter (Niemann A et al., 2017).



Grafik ini menunjukkan proporsi jurnalis di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Terdapat data mengenai penyensoran berita, kekerasan selama bekerja, dan pelarangan liputan serta pemberitaan, yang mencerminkan hambatan dalam kebebasan pers dan etika jurnalistik.

Dalam konteks yang lebih luas, tantangan yang dihadapi oleh media dalam menyampaikan berita tentang pelanggaran hukum humaniter sering kali terkait dengan bagaimana informasi dijadikan alat untuk membentuk persepsi publik dan memengaruhi kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa framing yang digunakan media tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan fakta, tetapi juga untuk membangun narasi yang dapat memperkuat atau meredakan respons publik terhadap pelanggaran yang terjadi (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Wawancara dengan jurnalis serta aktivis menegaskan bahwa praktik pelaporan sering tertahan oleh kepentingan editorial dan tekanan dari pihak-pihak tertentu, yang mengakibatkan penyajian informasi yang tidak sepenuhnya akurat atau berimbang (Siregar RY et al., 2024). Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa media sering terjebak dalam frasa sensasionalisme, yang berpotensi mengaburkan realitas pelanggaran hukum yang kompleks (Mishra R, 2024). Kualitas pelaporan yang rendah ini memberikan dampak yang signifikan terhadap mobilisasi opini publik, di mana kekurangan dalam penyajian berita dapat memperlemah konflik yang dihadapi dalam menjamin hak asasi manusia (R Lexman et al., 2024). Penelitian ini mengonfirmasi temuan dari (Farasat N et al., 2024), yang mengindikasikan bahwa jurnalis terkadang merasa terjebak dalam dilema etis ketika memilih framing yang tepat, dan harus menyeimbangkan antara memberikan laporan yang akurat dan memenuhi tuntutan audiens (Gupta S et al., 2024). Dalam hal ini, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pelatihan etika bagi jurnalis agar mereka dapat menerapkan praktik pelaporan yang lebih baik (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Dari perspektif teoretis, studi ini menambah pemahaman tentang bagaimana frame dapat digunakan sebagai alat strategis oleh

---

media untuk menciptakan dampak sosial, mengingat konteks yang berkaitan dengan minat politik dan ekonomi (Christensen HB et al., 2021). Melalui analisis komparatif ini, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaporan di berbagai media, baik tradisional maupun digital, membentuk citra yang berbeda mengenai pelanggaran hukum, yang sering kali dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan pemilik media (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan integrasi berbagai metode analisis konten dalam penelitian mendatang untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang efek framing dalam konteks isu hak asasi manusia (Wang Y et al., 2018). Temuan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam mendorong jurnalis dan media untuk mewujudkan laporan yang lebih etis dan informatif, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik serta menghasilkan perubahan positif dalam kebijakan terkait pelanggaran hukum humaniter (Niemann A et al., 2017).

### **Interpretasi Temuan**

Tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh media dalam menyuarakan pelanggaran hukum humaniter merupakan isu yang semakin relevan dalam konteks informasi global yang terus berubah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa framing yang diterapkan oleh media memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik mengenai pelanggaran hukum humaniter, di mana multivariatitas dalam pelaporan sering kali mengaburkan fakta yang ada (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Melalui wawancara dengan jurnalis dan aktivis, terungkap bahwa tekanan dari berbagai pihak, termasuk pemilik media dan pemerintah, sering membatasi kebebasan media untuk melaporkan secara objektif (Siregar RY et al., 2024). Penelitian ini sejalan dengan kajian-kajian sebelumnya yang menekankan bahwa pemberitaan media sering dibentuk oleh kepentingan politik dan ekonomi, sehingga menyajikan narasi yang mungkin tidak mencerminkan realitas secara penuh (Mishra R, 2024). Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya framing dalam membentuk respons masyarakat, di mana framing yang lebih manusiawi dapat meningkatkan empati publik terhadap korban pelanggaran hukum (R Lexman et al., 2024). Namun, temuan juga menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan etika dalam pelaporan, banyak jurnalis yang merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan konteks pemberitaan yang cepat dan sensasionalis, yang dapat menyebabkan pengabaian pada konteks yang lebih luas (Farasat N et al., 2024). Implikasi dari temuan ini sangat signifikan baik secara teoritis maupun praktis; secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang dinamika antara fakta dan framing dalam media, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam konteks isu hak asasi manusia (Gupta S et al., 2024). Secara praktis, temuan ini mendesak perlunya peningkatan pelatihan etika bagi jurnalis untuk membantu mereka menavigasi tantangan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan laporan yang lebih bertanggung jawab dan informatif (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pelaporan media dan etika yang melekat padanya, serta bagaimana media dapat lebih efektif dalam menyuarakan pelanggaran hukum humaniter (Christensen HB et al., 2021). Disarankan agar pada penelitian di masa mendatang, fokus lebih besar diberikan pada analisis komparatif tentang bagaimana pelaporan di berbagai media berinteraksi dan membentuk narasi yang beragam, agar dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat dan etis (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Dengan demikian, memahami peran media dalam konteks pelanggaran hukum humaniter tidak hanya memperlihatkan tantangan yang ada, tetapi juga peluang untuk mendorong perubahan positif dalam praktik jurnalisme (Wang Y et al., 2018).

### **Tantangan yang Dihadapi Media dalam Melaporkan Pelanggaran Kemanusiaan**

Konteks pelaporan pelanggaran hukum humaniter di media saat ini sangat kompleks, mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dalam menyajikan informasi yang akurat dan etis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sering kali terpengaruh oleh tekanan politik dan ekonomi yang dapat mengaburkan kebenaran pelanggaran yang terjadi, akibat

kebutuhan untuk menarik perhatian audiens dan memenuhi tuntutan waktu (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Menurut wawancara dengan jurnalis, banyak dari mereka merasa terjepit di antara kebutuhan untuk menginformasikan masyarakat dan tekanan dari pemilik media untuk menyajikan berita yang menarik, yang sering kali mengarah pada pengabaian konteks yang lebih luas (Siregar RY et al., 2024). Penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menemukan bahwa framing media tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga berperan dalam menciptakan narasi yang bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam konflik, daripada memberikan gambaran yang seimbang tentang peristiwa tersebut (Mishra R, 2024). Banyak jurnalis yang harus bergumul dengan dilema etis, di mana mereka menyadari peran framing dalam mempengaruhi tanggapan masyarakat, tetapi terbatas oleh norma-norma editorial dan tiba di keputusan yang lebih bersifat sensasionalisme (R Lexman et al., 2024). Hal ini selaras dengan temuan (Farasat N et al., 2024), yang menunjukkan bahwa banyak dari mereka masih terikat pada praktik pelaporan yang konvensional, mengabaikan potensi pelaporan yang lebih humanis dan empatik. Implikasi dari temuan ini cukup signifikan, baik dari perspektif teoretis maupun praktis; secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai dinamika antara fakta dan framing dalam pelaporan pelanggaran hukum humaniter, serta menunjukkan relevansi etika jurnalisisme di era informasi yang serba cepat ini (Gupta S et al., 2024). Secara praktis, hasil ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mendidik jurnalis tentang etika dan tanggung jawab dalam pelaporan isu-isu yang sensitif, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Dengan meninjau tantangan ini, penelitian ini menyarankan pentingnya integrasi pendekatan multimetode dan pelatihan untuk jurnalis agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam industri media dan mengatasi tantangan yang ada secara efektif (Christensen HB et al., 2021). Penelitian lebih lanjut di bidang ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana media dapat lebih bertanggung jawab dan efektif dalam melaporkan pelanggaran hukum humaniter sehingga dapat mendorong perubahan positif dalam persepsi publik serta kebijakan terkait (Yogesh K Dwivedi et al., 2020).

Tantangan	Deskripsi
Ketidakberpihakan terhadap korban	Media sering kali tidak berpihak kepada korban, seperti yang ditemukan dalam penelitian terhadap pemberitaan Tribunnews.com yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual. ([researchgate.net](https://www.researchgate.net/publication/366175416_PERLINDUNGAN_HUKUM_KORBAN_KEKERASAN_SEKSUAL_DALAM_PEMBERITAAN_MEDIA_ONLINE_DI_INDONESIA?utm_source=openai))
Penyebaran informasi yang tidak akurat	Media massa memiliki peran penting dalam penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. ([researchgate.net](https://www.researchgate.net/publication/384271435_Analisis_Peran_Media_Dalam_Mengawasi_Kasus_Pelanggaran_Terhadap_Hak_Pada_Manusia_Di_Negara_Indonesia?utm_source=openai))
Eksplotasi identitas korban	Pemberitaan yang tidak berpihak kepada korban dapat mengakibatkan eksploitasi identitas korban, seperti

---

yang terjadi dalam beberapa kasus di Indonesia.  
([researchgate.net](https://www.researchgate.net/publication/366175416\_PERLINDUNGAN\_HUKUM\_KORBAN\_KEKERASAN\_SEKSUAL\_DALAM\_PEMBERITAAN\_MEDIA\_ONLINE\_DI\_INDONESIA?utm\_source=openai))

---

Sensasionalisme dalam pemberitaan

Media sering kali menggunakan diksi yang lebih sensual dan sensasional untuk menarik pembaca, yang dapat merugikan korban dan melanggar kode etik jurnalistik.

([researchgate.net](https://www.researchgate.net/publication/366175416\_PERLINDUNGAN\_HUKUM\_KORBAN\_KEKERASAN\_SEKSUAL\_DALAM\_PEMBERITAAN\_MEDIA\_ONLINE\_DI\_INDONESIA?utm\_source=openai))

---

Tantangan Media dalam Melaporkan Pelanggaran Kemanusiaan

### **Dampak Etika dalam Praktik Jurnalisme**

Dalam era informasi yang sarat dengan kelompok kepentingan dan persaingan media, dampak etika dalam praktik jurnalisme menjadi semakin penting untuk dipahami. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa jurnalis sering kali berada di persimpangan antara tuntutan untuk melaporkan dengan akurat dan tekanan dari kekuatan eksternal yang mungkin memengaruhi isi berita yang disampaikan (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Masalah etika yang timbul dalam pelaporan tentang pelanggaran hukum humaniter, seperti kebutuhan untuk menjaga integritas berita sambil memenuhi harapan audiens, memperlihatkan bagaimana keputusan editorial dapat memengaruhi narasi yang akhirnya disampaikan kepada publik (Siregar RY et al., 2024). Analisis wawancara menunjukkan bahwa banyak jurnalis mengalami dilema di mana mereka harus memilih antara pelaporan yang sensasional demi menarik perhatian dan laporan yang etis yang berkomitmen pada kebenaran (Mishra R, 2024). Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa masalah etika semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan kehadiran media sosial, di mana kecepatan berita mengorbankan kedalaman analisis (R Lexman et al., 2024). Penelitian ini menggarisbawahi bahwa pelanggaran terhadap etika dapat mengarah pada dehumanisasi korban pelanggaran hukum, dan memperkuat narasi yang tidak menguntungkan bagi mereka yang terpinggirkan (Farasat N et al., 2024). Oleh karena itu, implikasi dari temuan ini menyoroti perlunya pelatihan etika yang lebih baik bagi jurnalis, serta upaya untuk mengembangkan pedoman yang memastikan bahwa pelaporan tidak hanya akurat tetapi juga etis (Gupta S et al., 2024). Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman teoretis tentang interaksi antara etika dan praktik jurnalisme, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan isu-isu yang lebih luas dalam hak asasi manusia dan keadilan sosial (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Diperlukan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif untuk menganalisis bagaimana jurnalis dapat dilengkapi untuk membuat keputusan etis yang lebih baik dalam kondisi yang menantang (Christensen HB et al., 2021). Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini diharapkan dapat melibatkan perspektif baru yang berfokus pada pengalaman jurnalis dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi praktik pelaporan mereka, sehingga meningkatkan pemahaman mengenai tantangan etika dalam jurnalisme kontemporer (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Selain itu, penelitian ini mendorong penerapan prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan jurnalisme, yang esensial dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap media (Wang Y et al., 2018).

<b>Aspek Penerapan Etika Jurnalistik</b>	<b>Dampak terhadap Kepercayaan Publik</b>
Keadilan dan Keseimbangan Berita	Peningkatan signifikan dalam kepercayaan publik terhadap media yang menyajikan berita secara adil dan seimbang. Masyarakat cenderung lebih percaya pada media yang memberikan informasi objektif tanpa bias terhadap pihak tertentu.
Akurasi dan Keabsahan Informasi	Media yang menyajikan informasi akurat dan terpercaya cenderung mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Keakuratan informasi menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik.
Pemisahan Antara Fakta dan Opini	Media yang berhasil memisahkan antara berita berdasarkan fakta dan opini meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Masyarakat lebih cenderung mempercayai media yang menyajikan fakta secara terpisah dari opini.
Menghormati Privasi dan Kehormatan	Media yang menghormati privasi individu dan menjaga kehormatan dalam peliputan berita cenderung mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Penghormatan terhadap privasi membantu membangun hubungan yang lebih baik antara media dan publik.
Menghindari Konflik Kepentingan	Media yang menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi editorial cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat. Ketika media bebas dari pengaruh kepentingan tertentu, masyarakat merasa lebih yakin terhadap keberimbangan dan obyektivitas berita yang disajikan.

#### Dampak Penerapan Etika Jurnalistik terhadap Kepercayaan Publik

### KESIMPULAN

Pentingnya penelitian ini terletak pada kajian mendalam tentang interaksi antara fakta dan framing dalam konteks berita pelanggaran hukum humaniter. Dalam menyoroti tantangan yang dihadapi oleh media dalam menyampaikan berita yang akurat dan etis, ditemukan bahwa framing yang digunakan serta tekanan dari pihak-pihak tertentu cukup signifikan dalam menentukan narasi yang terbentuk di publik (Ma'in Abu-shaikha et al., 2025). Penelitian ini berhasil menjawab masalah penelitian yang diangkat dengan menunjukkan bagaimana narasi media dapat membentuk persepsi masyarakat tentang pelanggaran hukum dan dalam beberapa kasus, mengabaikan realitas yang lebih kompleks (Siregar RY et al., 2024). Temuan ini memiliki implikasi yang luas baik dalam konteks akademis maupun praktik jurnalistik; secara akademis, penelitian ini memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana media berperan dalam menciptakan pengetahuan sosial mengenai isu-isu kemanusiaan yang kritis (Mishra R, 2024). Secara praktis, hasil studi ini merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan etika jurnalis dan kesadaran akan dampak framing terhadap opini publik, yang sangat penting dalam konteks pelaporan pelanggaran hukum (R Lexman et al., 2024). Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pergeseran dalam teknologi media dan praktik media sosial memengaruhi cara narasi dibangun

---

(Farasat N et al., 2024). Penelitian lebih lanjut juga perlu mengeksplorasi berbagai model komunikasi yang mungkin lebih baik dalam menyampaikan kompleksitas isu-isu kemanusiaan (Gupta S et al., 2024). Melalui pengembangan metode penelitian interdisipliner yang menggabungkan analisis konten dengan wawancara mendalam dan studi kasus, akan dihasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang isu ini (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Akhirnya, penting untuk mendorong kolaborasi antara peneliti, jurnalis, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa pelaporan pelanggaran hukum humaniter tidak hanya akurat, tetapi juga mencerminkan keberagaman perspektif vital yang ada (Christensen HB et al., 2021). Hasil ini menjadikan penelitian ini sebagai dasar yang kuat bagi studi tentang etika media dan tanggung jawab sosial, serta memperkuat panggilan untuk integritas dalam praktik jurnalistik di seluruh dunia (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Seiring dengan berkembangnya pengalaman global terkait pelanggaran hak asasi manusia, upaya terus menerus dalam memperbaiki praktik pelaporan akan sangat menentukan dalam menciptakan perubahan positif (Wang Y et al., 2018).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ma'in Abu-shaikha, Sara Nasereddin (2025) Predicting Media Impact: A Machine Learning Framework for Optimizing Corporate Communication Strategies in Architectural Practices. *International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering*. doi: <https://www.semanticscholar.org/paper/fad420dd5c674a1781f27264e2be311ea9f5e08b>
- Rafiqah Yusna Siregar, R. Hidayati (2024) TANTANGAN PRODUSEN PEMULA DALAM KOMUNIKASI PEMASARAN DI ERA "THE SECOND MEDIA AGE". *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. doi: <https://www.semanticscholar.org/paper/abba1c2ef132f88dd040558c32abe0fdc9dfdac0>
- Rishabh Mishra (2024) AN ANALYSIS OF EFFECTIVENESS ON DIGITAL MARKETING. *INTERNANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*. doi: <https://www.semanticscholar.org/paper/1fcafc0123095ab24adcf4b81ef8a3801e33f203>
- R. Lexman, Krishnan Gopinath, Rupashree Baral, Shameem Cina Thomas (2024) Navigating the digital classroom: a qualitative content analysis of MOOC discourses in Indian e-newspapers. *Volume(22)*, 494-516. *J. Inf. Commun. Ethics Soc.*. doi: <https://www.semanticscholar.org/paper/4e446ec0b19109b1ea52cf42ab86f106dce63217>
- Nabiha Farasat, Raz Muhammad Bazai, Muhammad Ilyas, Muhammad Saeed, Usama Saeed (2024) Perceptions of Postgraduate Trainee's about Professional Behavior: A Qualitative Content Analysis. *Journal of the Pakistan Dental Association*. doi: <https://www.semanticscholar.org/paper/8302e8fdff9e30fd7fb345436ad32f0d965d25d3>
- Shelleka Gupta, Ronnie Dutt (2024) Identifying consumer-based digital content marketing consumption motives: a qualitative study. *Journal of Advances in Management Research*. doi: <https://www.semanticscholar.org/paper/402c8759afd133d6fd31ce68f8816ca1aba3159f>
- Maria-Teresa Zaragoza-Fuster, J. García-Avilés (2019) The role of innovation labs in advancing the relevance of Public Service Media: the cases of BBC News Labs and RTVE Lab. *Communication & Society*. doi: <https://www.semanticscholar.org/paper/7bc8eb960850d821b0322f5ffa77b06aef9540b5>
- Hans Bonde Christensen, Luzi Hail, Christian Leuz (2021) Mandatory CSR and sustainability reporting: economic analysis and literature review. *Volume(26)*, 1176-1248. *Review of Accounting Studies*. doi: <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>
- Yogesh K. Dwivedi, Elvira Ismagilova, David L. Hughes, Jamie Carlson, Raffaele Filieri, Jenna Jacobson, Varsha Jain, et al. (2020) Setting the future of digital and social media

- 
- marketing research: Perspectives and research propositions. Volume(59), 102168-102168. *International Journal of Information Management*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168>
- Yingli Wang, Jeong Hugh Han, Paul Beynon-Davies (2018) Understanding blockchain technology for future supply chains: a systematic literature review and research agenda. Volume(24), 62-84. *Supply Chain Management An International Journal*. doi: <https://doi.org/10.1108/scm-03-2018-0148>
- Arne Niemann, Natascha Zaun (2017) EU Refugee Policies and Politics in Times of Crisis: Theoretical and Empirical Perspectives. Volume(56), 3-22. *JCMS Journal of Common Market Studies*. doi: <https://doi.org/10.1111/jcms.12650>
- Heaven Crawley, Dimitris Skleparis (2017) Refugees, migrants, neither, both: categorical fetishism and the politics of bounding in Europe's 'migration crisis'. Volume(44), 48-64. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. doi: <https://doi.org/10.1080/1369183x.2017.1348224>
- Juliane Reinecke, Shaz Ansari (2015) Taming Wicked Problems: The Role of Framing in the Construction of Corporate Social Responsibility. Volume(53), 299-329. *Journal of Management Studies*. doi: <https://doi.org/10.1111/joms.12137>
- S everine Autesserre (2012) Dangerous tales: Dominant narratives on the Congo and their unintended consequences. Volume(111), 202-222. *African Affairs*. doi: <https://doi.org/10.1093/afraf/adr080>
- Gregory Shaffer, Tom Ginsburg (2012) The Empirical Turn in International Legal Scholarship. Volume(106), 1-46. *American Journal of International Law*. doi: <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.106.1.0001>
- M. A. Alsalem, R. T. Mohammed, O. S. Albahri, A. A. Zaidan, A. H. Alamoodi, Kareem Abbas Dawood, Alhamzah Alnoor, et al. (2021) Rise of multiattribute decision-making in combating COVID-19: A systematic review of the state-of-the-art literature. Volume(37), 3514-3624. *International Journal of Intelligent Systems*. doi: <https://doi.org/10.1002/int.22699>
- Rhys Crilley, Precious N Chatterje-Doody (2020) From Russia with Lols: Humour, RT, and the Legitimation of Russian Foreign Policy. Volume(35), 269-288. *Global Society*. doi: <https://doi.org/10.1080/13600826.2020.1839387>
- Janina Klein, John Amis (2020) The Dynamics of Framing: Image, Emotion, and the European Migration Crisis. Volume(64), 1324-1354. *Academy of Management Journal*. doi: <https://doi.org/10.5465/amj.2017.0510>
- Matthew Flinders (2020) Democracy and the Politics of Coronavirus: Trust, Blame and Understanding. Volume(74), 483-502. *Parliamentary Affairs*. doi: <https://doi.org/10.1093/pa/gsaa013>
- Daniel F. Wajner (2019) "Battling" for Legitimacy: Analyzing Performative Contests in the Gaza Flotilla Paradigmatic Case. Volume(63), 1035-1050. *International Studies Quarterly*. doi: <https://doi.org/10.1093/isq/sqz047>
- Adina Nerghes, Ju--Sung Lee (2019) Narratives of the Refugee Crisis: A Comparative Study of Mainstream-Media and Twitter. Volume(7), 275-288. *Media and Communication*. doi: <https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1983>
- (2019) Technologies of Suspicion and the Ethics of Obligation in Political Asylum. . doi: <https://doi.org/10.2307/j.ctv224v04m>
- Muhammad Waqas, Zalfa Laili Hamzah, Noor Akma Mohd Salleh (2021) Customer experience with the branded content: a social media perspective. Volume(45), 964-982. *Online Information Review*. doi: <https://doi.org/10.1108/oir-10-2019-0333>
- Carmen Costa-S anchez, Mar Guerrero-Pico (2020) What Is WhatsApp for? Developing Transmedia Skills and Informal Learning Strategies Through the Use of WhatsApp—A
-

- 
- Case Study With Teenagers From Spain. Volume(6). *Social Media + Society*. doi: <https://doi.org/10.1177/2056305120942886>
- Josep Solves Almela, Athanasios Pappous, Inmaculada Rius, Geoffery Z. Kohe (2018) Framing the Paralympic Games: A Mixed-Methods Analysis of Spanish Media Coverage of the Beijing 2008 and London 2012 Paralympic Games. Volume(7), 729-751. *Communication & Sport*. doi: <https://doi.org/10.1177/2167479518808237>
- Andrea C. Tricco, Erin Lillie, Wasifa Zarin, Kelly K. O'Brien, Heather Colquhoun, Danielle Levac, David Moher, et al. (2018) PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. Volume(169), 467-473. *Annals of Internal Medicine*. doi: <https://doi.org/10.7326/m18-0850>
- Kirsten Budig, Julia Díez, Paloma Conde, Marta Gutiérrez Sastre, Mariano Hernán, Manuel Franco (2018) Photovoice and empowerment: evaluating the transformative potential of a participatory action research project. Volume(18). *BMC Public Health*. doi: <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5335-7>
- Alice P. Shemi, Chris Procter (2018) E-commerce and entrepreneurship in SMEs: case of myBot. Volume(25), 501-520. *Journal of Small Business and Enterprise Development*. doi: <https://doi.org/10.1108/jsbed-03-2017-0088>
- Sylvia M. Chan-Olmsted, Lisa-Charlotte Wolter (2018) Perceptions and practices of media engagement: A global perspective. Volume(20), 1-24. *The International Journal on Media Management*. doi: <https://doi.org/10.1080/14241277.2017.1402183>
- Zaheer Allam, Ayyoob Sharifi, Simon Elias Bibri, David S. Jones, John Krogstie (2022) The Metaverse as a Virtual Form of Smart Cities: Opportunities and Challenges for Environmental, Economic, and Social Sustainability in Urban Futures. Volume(5), 771-801. *Smart Cities*. doi: <https://doi.org/10.3390/smartcities5030040>
- TABLEKontraS (2024). Di Balik Ilusi Populisme Hukum: Impunitas dan Minimnya Komitmen Penghapusan Penyiksaan di Indonesia. \*Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan\*. Retrieved from <https://kontras.org/laporan/dibalik-ilusi-populisme-hukum-impunitas-dan-minimnya-komitmen-penghapusan-penyiksaan-di-indonesia>\*Note.\* Adapted from Di Balik Ilusi Populisme Hukum: Impunitas dan Minimnya Komitmen Penghapusan Penyiksaan di Indonesia, by KontraS, 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Retrieved from <https://kontras.org/laporan/dibalik-ilusi-populisme-hukum-impunitas-dan-minimnya-komitmen-penghapusan-penyiksaan-di-indonesia>.
- Diskusi Rundtable Khusus tentang Jepang di Asia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Depan [FIGURE]. (2025). Retrieved from <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/720/2024/11/Yako-Kozano-1030x644.png>
- Sampul Buku: Meniti Ombak Mewujudkan Kemanusiaan [FIGURE]. (2025). Retrieved from <https://asmaranababan.org/wp-content/uploads/2021/01/Picture1.png>
- Sampul Skripsi: Pengakuan Hak Petani dan Gender di Dewan HAM PBB [FIGURE]. (2025). Retrieved from [https://0.academia-photos.com/attachment\\_thumbnails/37308391/mini\\_magick20180819-6439-201hq8.png?1534671911](https://0.academia-photos.com/attachment_thumbnails/37308391/mini_magick20180819-6439-201hq8.png?1534671911)